AS SIYASAH
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
E ISSN: 2549-1865
Vol. 11 No. 1 Bulan Mei Tahun 2026
https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/index
Jurnalfisipuniska@gmail.com

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN PALINGKAU LAMA KECAMATAN KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS

Tiara Astigini[1]*, Ade Hermawan[2]
[1*2]Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Kalimantan MAB Indonesia
Email: astiginitiara@gmail.com
*Corresponding Author**

DOI : 10.31602/as.v11i1.20078
Riwayat Artikel :
Diterima : 17 – Juli – 2025
Disetujui : 27 – Mei – 2026
Diterbitkan : 30 – Mei – 2026
Hal : 10 – 18

Abstract

The purpose of this study was to determine the description of the Implementation of the Social Assistance Program in the Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Palingkau Lama Village, Kapuas Murung District, Kapuas Regency along with the constraints on the implementation of this assistance program. This research method uses a qualitative approach with a descriptive qualitative research type. Data were collected by conducting interviews with informants, namely the Palingkau Lama Village, Kapuas District and the surrounding community. Data analysis used the description, reduction, and selection stages. The results of this study indicate that based on indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness, the social assistance program policy in Palingkau Lama Village, Kapuas Murung District, Kapuas Regency has been running well. This is based on community statements in the interview results. Most people use this assistance to meet their daily needs. The obstacles faced in the distribution of social assistance programs in Palingkau Lama Village, Kapuas Murung District, Kapuas Regency are limited data and delays in distributing assistance. Other obstacles faced based on observations are the lack of coordination between governments, limited resources, and other technical problems in the field.

Keywords: *Evaluation, Policy, Social Assistance*

This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright ***© 2026 by Journal As Siyasah***

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomis, politik dan social psikologis. Kemiskinan dapat mengahambat pembangunan suatu bangsa, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia. Dampak yang timbul akibat dari kemiskinan bersifat menyebar (multiplie effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Dalam Pembukaan UUD 1945 dimana dijelaskan bahwa Indonesia mempunyai suatu tujuan yang besar yakni mensejahterakan Masyarakat dalam berbagai aspek apapun itu. Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan Rakyat salah satunya sebagian masyarakat yang memang masuk ke dalam kriteria penerima bantuan ini.

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, baik akibat kondisi sosial, bencana, maupun faktor lain yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (Kementerian Sosial RI, 2024). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak

secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Namun, dalam penerapannya program bantuan sosial ini masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki sehingga diperlukan evaluasi terkait dengan pelaksanaannya. Evaluasi kebijakan ialah salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan untuk mempelajari suatu hasil dari kebijakan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Winarta, Winarta, & Sumada, 2020). Evaluasi terhadap kebijakan bantuan sosial di wilayah ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program yang telah diterapkan. Dengan memahami berbagai permasalahan yang muncul, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas kebijakan bantuan sosial di masa depan (Wahyudi, 2022).

Program bantuan sosial di Indonesia telah ada sejak lama dalam berbagai bentuk. Namun, beberapa program utama diluncurkan pada waktu berbeda yang pertama Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan pada 2007 dan program kedua Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mulai diterapkan pada 2017. Kemudian program bantuan sosial ini juga diterapkan di beberapa Provinsi termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, program ini diimplementasikan di Kelurahan Palingakau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas.

Kelurahan Palingkau Lama adalah Kelurahan yang berada di Kecamatan Kapuas Murung yang jumlah penduduknya terdiri dari 6.150 jiwa dan terdiri dari 18 RT. Kelurahan Palingkau Lama termasuk dalam penerima Bantuan Sosial BPNT dan PKH. Pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Palingkau Lama yang dalam hal ini adalah BPNT dan PKH merupakan upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat tidak mampu dan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dimana pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kelurahan Palingkau Lama terdaftar 3.294 Individu dan 1.272 Keluarga penduduk miskin. Dalam pelaksanaan nya sejauh ini mungkin sudah berjalan sesuai aturan namun masih kurang efektif, baik itu dalam pendataan atau penentuan masyarakat yang layak menerima bantuan sosial tersebut atau tidak layak.

Program bantuan sosial merupakan program yang disediakan oleh pemerintah, disalurkan hingga tingkat Kelurahan agar tepat sasaran. Pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan berbagai jenis bantuan social salah satunya yaitu (PKH) dan (BPNT). Program bantuan sosial berupa PKH ditujukan kepada keluarga miskin yang memilki komponen seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. Program bantuan sosial berupa BPNT ditujukan kepada termasuk dalam keluarga miskin, tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan di bawah standar, bukan ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI, Polri, atau pensiunan PNS (Saputra, 2019).

Pada kenyataannya penerima manfaat dari Bansos tersebut bisa dikatakan belum sepenuhnya tepat sasaran. Selain itu, permasalahan dalam implementasi program bantuan sosial juga menjadi perhatian utama. Beberapa penerima manfaat mengeluhkan ketidaktepatan data penerima yang menyebabkan beberapa warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak menerima, sementara ada pihak lain yang kurang memenuhi syarat namun tetap menerima bantuan. Selain itu, keterlambatan dalam proses distribusi bantuan juga menjadi salah satu kendala yang sering terjadi di lapangan (Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Devi Sasmita (2024),

dengan judul penelitian Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, program Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah berjalan cukup baik walaupun masih ada beberapa kendala teknis pada program tersebut yang belum terselesaikan seperti kartu yang rusak, saldo yang masih kosong, dan penyaluran bantuan masih tidak merata sehingga tidak sesuai peruntukannya atau belum tepat sasaran dimana keluarga yang mampu dari segi finansial justru mendapatkan bantuan, sedangkan keluarga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan.

Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Puspitasari, Diana Puspita Retno, Salsabilla Auliazaki A, Tiara Nebrisca Valonika A (2025), dengan judul penelitian Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya menunjukkan bahwa BPNT telah membantu meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi beban ekonomi penerima manfaat, meskipun terdapat kendala seperti aksesibilitas, distribusi mendadak, dan kualitas barang. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, pengawasan kualitas, pendataan yang lebih akurat, danevaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas program. Temuan ini relevan untuk perbaikan implementasi program di masa mendatang, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas"

TINJAUAN PUSTAKA

Program Bantuan Sosial

Program bantuan sosial merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan sosial dan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2019, bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk tunai maupun non-tunai kepada individu, keluarga, atau kelompok rentan. World Bank (2018) menegaskan bahwa bantuan sosial bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui dukungan finansial dan layanan sosial. Sementara itu, Bappenas (2020) menyebutkan bahwa bantuan sosial merupakan strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dengan berbagai bentuk bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa definisi dari kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten yang berada di bawah kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya. Pada pelaksanaan tugas ini, Kelurahan berfungsi menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, pembinaan ketertiban wilayah, pemeliharaan fasilitas umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyusunan program pembangunan, serta pembinaan lembaga sosial dan gotong royong, termasuk melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai peraturan yang berlaku.

Good Governance

Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian Good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta

efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menetapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, yaitu profesionalitas dalam pelayanan, akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, transparansi informasi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta supremasi hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia serta nilai-nilai masyarakat.

Evaluasi Kebijakan

Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau cara bertindak. Untuk mengevaluasi program atau kebijakan publik, ada standar yang harus diikuti untuk menentukan seberapa efektif program atau kebijakan tersebut. Untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, kriteria dapat digunakan. Kriteria evaluasi kebijakan, menurut William N.Dunn (2018), termasuk enam kategori, yaitu: 1) efektivitas; 2) efisien; 3) kecukupan; 4) pemerataan; 5) responsivitas; dan 6) ketepatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif (Sugiyono, 2016) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan (Sudaryono, 2017:82). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, serta interaksi sosial (Moleong, 2015:4) yang tidak bisa diukur secara statistik. Penelitian dilakukan di Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selama periode Maret hingga Juni 2025. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (Norfriansyah, 2018), observasi langsung (Sugiyono, 2019), dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari berbagai sudut pandang.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Lurah, Bendahara Kelurahan, serta lima orang masyarakat penerima manfaat program bantuan sosial (PKH dan BPNT). Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen kebijakan dan catatan resmi yang relevan dengan program bantuan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan pedoman wawancara, catatan observasi, serta pengumpulan arsip dan dokumen untuk memperkuat validitas data.

Analisis data dilakukan secara induktif dan deskriptif melalui tiga tahap utama: deskripsi, reduksi, dan seleksi. Peneliti pertama-tama menggambarkan seluruh temuan lapangan, kemudian mereduksi data untuk fokus pada isu tertentu, dan akhirnya menganalisis secara mendalam guna menghasilkan pemahaman baru terhadap fenomena yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun konstruksi makna yang utuh dan objektif, sehingga hasil penelitian dapat merefleksikan kondisi nyata serta memberi kontribusi dalam pengembangan pengetahuan maupun kebijakan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial di Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas

1. Indikator Efektivitas

Efektivitas mengukur sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mencapai tujuan utama, yaitu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh dalam BPNT adalah apakah penerima manfaat mengalami peningkatan ketahanan pangan setelah menerima bantuan. Efektivitas dari kata dasar efektif yang memiliki arti

pencapaian akan sebuah keberhasilan guna mencapai keinginan yang telah ditentukan. Efektivitas mengandung hubungan saling terkait dengan hasil yang sungguh-sungguh ingin diraih.

Program ini terbukti efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. Sebagian penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan yang mereka terima sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari – hari seperti untuk membeli beras dan kebutuhan pangan lainnya, serta membeli kebutuhan sekolah anak mereka. Efektfitas ini sangat penting karena dapat menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan berdampak langsung pada kesejahteraan penerima, memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk kebutuhan lain yang juga penting. Keberhasilan ini bisa dikaitkan dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang matang, sehingga efektivitas dalam hal ini telah tercapai.

2. Indikator Efisiensi

Efisiensi mengukur apakah sumber daya yang digunakan dalam PKH dan BPNT dikelola secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Contoh dalam PKH adalah apakah dana bantuan diterima tepat waktu dan tanpa 2biaya distribusi yang berlebihan. Efisiensi mengandung arti jumlah usaha yang dibutuhkan dalam mencapai tingkatan tentang seberapa efektif. Efisiensi juga memiliki persamaan arti dengan rasionalitas ekonomi, dua kata tersebut saling keterkaitan antara efektivitas dan hal yang sunggug-sungguh dilakukan dan biasanya tolak ukur dari sebuah efisiensi adalah ongkos atau tarif biaya yang perlu dikeluarkan. Suatu kebijakan dikatakan memenuhi efektivitas yang tinggi apabila dalam hal biaya menggunakan biaya terendah maka dapat dikatakan telah efisien.

Mekanisme penyaluran bantuan yang efisien memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh penerima manfaat tanpa hambatan berarti. Sebagian besar penerima mengapresiasi kecepatan dan keteraturan penyaluran bantuan. Efisiensi dalam penyaluran bantuan ini menunjukkan bahwa sistem distribusi yang digunakan telah dirancang dengan baik, memungkinkan bantuan untuk sampai tepat waktu kepada mereka yang membutuhkan. Walaupun bantuan yang diterima terkadang mengalami keterlambatan penyaluran namun hal ini dapat ditangani dengan baik oleh pihak Kelurahan Palingkau. Sehingga, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program bantuan ini sudah berjalan secara efesien.

3. Indikator Kecukupan

Kecukupan menilai sejauh mana BPNT mampu memenuhi kebutuhan penerima manfaat secara memadai. Contoh dalam PKH adalah apakah jumlah dana yang diberikan cukup untuk membantu keluarga miskin mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Contoh dalam BPNT adalah apakah bantuan pangan mencukupi kebutuhan gizi keluarga penerima manfaat.

Kecukupan adalah dengan terpenuhinya suatu kebutuhan yang bisa memberi rasa puas tentang segala sesuatu yang diinginkan. Ketepatgunaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengetahui suatu tindakan yang berasal dari sebuah kebijaksanaan dalam memenuhi tujuan atau kelebihan dari suatu kegunaan kepada target. Kecukupan bantuan yang diberikan oleh program ini menunjukkan bahwa jenis dan jumlah bantuan sesuai dengan kebutuhan dasar penerima manfaat. Banyak penerima manfaat yang menyatakan bahwa bantuan pangan yang mereka terima cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Hal ini penting karena bantuan yang cukup dapat memastikan bahwa kebutuhan kebutuhan sehari – hari penerima manfaat terpenuhi, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Kecukupan ini juga mengurangi kekhawatiran penerima manfaat tentang ketidakpastian pemenuhan kebutuhan dasar mereka, memungkinkan

mereka untuk lebih fokus pada upaya peningkatan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Pendamping BPNT menyatakan bahwa kebutuhan dasar masyarakat sebagian besar terpenuhi melalui program BPNT, meskipun ada beberapa penerima yang merasa jumlah dan kualitas bantuan masih perlu ditingkatkan. Pegawai kelurahan menambahkan bahwa program ini cukup membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi ada beberapa aspek yang bisa diperbaiki agar bantuan lebih merata dan mencukupi. Pernyataan dari masyarkat juga menunjukkan bahwa kebutuhan dasar mereka cukup terbantu dengan adanya program ini. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa kebutuhan dasar mereka sangat terpenuhi dan merasa sangat terbantu. Namun, ada juga menyebutkan bahwa bantuan kadang tidak cukup, terutama untuk keluarga besar, meskipun mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sehingga, indikator kecukupan ini telah terpenuhi.

4. Indikator Pemerataan

Pemerataan menilai apakah BPNT didistribusikan secara adil kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Contoh dalam PKH adalah apakah seluruh keluarga miskin yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan tanpa terkecuali.

Pemerataan disini mengandung arti sebuah kegunaan dan tarif ongkos yang dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan program, dan apakah suatu hal yang termuat dalam program telah dibagikan sesuai dengan porsi yang sama untuk kalangan-kalangan yang terlibat di dalamnya. Sebagian besar penerima manfaat merasa bahwa distribusi bantuan dilakukan secara adil, meskipun ada beberapa keluhan tentang ketidakadilan kecil. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk memastikan bahwa bantuan mencapai semua yang berhak menerima. Pemerataan yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Keluhan tentang ketidakadilan kecil bisa disebabkan oleh faktor, seperti perbedaan dalam jumlah atau kualitas bantuan yang diterima, atau perbedaan dalam waktu penyaluran.

Meskipun terdapat beberapa ketidakpuasan terkait ketidakmerataan atau kekurangan dalam jumlah bantuan. Pendamping BPNT dan Sekretaris Desa mengakui adanya kasus dimana bantuan tidak selalu merata, namun secara keseluruhan, sistem distirbusi dianggap adil. Masyarakat juga mencatat bahawa, meski bantuan umumnya adil, ada kalanya perbedaan jumlah bantuan yang diterima menimbulkan ketidakpuasan.

5. Indikator Responsivitas

Responsivitas mengukur sejauh mana PKH dan BPNT dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Responsivitas yang baik dari pemerintah dalam menangani keluhan penerima manfaat menunjukkan adanya upaya yang kuat untuk memantau dan memperbaiki pelaksanaan program secara terus – menerus.

Sebagian besar penerima manfaat menyatakan bahwa mereka dapat dengan mudah melaporkan maslah yang dihadapi, dan bahwa pemerintah atau petugas terkait menanggapi keluhan mereka dengan cepat dan efektif. Tanggapan yang cepat dan baik terhadap masalah yang dihadapi penerima manfaat sangat penting untuk memastikan bahwa program tetap berjalan dengan baik dan efektif. Responsivitas ini juga menunjukkan bahwa ada saluran komunikasi yang baik antara penerima manfaat dan pemerintah, yang memungkinkan penanganan masalah secara cepat dan tepat

6. Indikator Ketepatan

Indikator keakuratan dalam penilaian program bantuan sosial bertujuan untuk menentukan apakah bantuan tersebut benar-benar menjangkau kelompok masyarakat dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Palingkau Lama, indicator ini mencakup kejelasan data penerima manfaat, relevansi kondisi ekonomi penerima dengan kriteria program dan ketepatan dalam penyaluran bantuan.

Hasil dari wawancara dan pengamatan mengungkapkan bahwa masih ada masalah terkait keakuratan data penerima bantuan. Beberapa individu di masyarakat mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara penerima manfaat dan kondisi sosial ekonomi mereka. Contohnya ada warga yang seharusnya tidak menerima bantuan karena mampu sementara mereka yang lebih memerlukan malah belum terdaftar sebagai penerima. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai sasaran program masih memerlukan peningkatan.

Pihak Kelurahan mengakui bahwa kesalahan tersebut sebagai dasar disebabkan oleh keterbatasan dalam system pendataan, terutama penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun Kelurahan dapat mengajukan permohonan pembaruan data proses tersebut memakan waktu karena harus mengikuti harapan dan prosedur yang rumit. Meskipun demikian, Kelurahan berusaha untuk memperbaiki system ini melalui kerjasama dengan pendamping PKH sera Dinas Sosial. Tujuannya agar program bantuan sosial di masa mendatang dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan, sehingga keakuratan dalam distribusi bantuan sosial dapat ditingkatkan.

Kendala Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas

1. Keterbatasan Data

Data penerima manfaat yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan dalam penyaluran bantuan. Keterbatasan data ini mencakup :

1) Ketersediaan data yang tidak lengkap. Data yang tersedia tidak mencakup semua variabel atau indikator yang diperlukan untuk analisis.
2) Kualitas data yang buruk. Data yang tersedia memiliki kualitas yang buruk, seperti data yang tidak akurat, tidak konsisten, atau tidak relevan.
3) Keterbatasan akses data. Data yang tersedia tidak dapat diakses atau tidak dapat diperoleh karena alasan keamanan, privasi, atau lainnya.
4) Keterbatasan waktu. Data yang tersedia tidak terkini atau tidak up-to-date, sehingga tidak dapat digunakan untuk analisis yang memerlukan data terbaru.

2. Keterlambatan Penyaluran Bantuan

Keterlambatan penyaluran bantuan dapat menyebabkan kesulitan bagi penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keterlambatan ini mencakup :

1) Proses birokrasi yang rumit. Proses birokrasi yang rumit dan berbelit-belit dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan.
2) Keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan, karena pemerintah atau lembaga terkait perlu melakukan proses penganggaran yang lebih panjang.
3) Keterlambatan dalam pengumpulan data. Keterlambatan dalam pengumpulan data penerima bantuan dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan.
4) Masalah teknis, seperti kesalahan dalam sistem pembayaran atau distribusi bantuan, dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan.

3. Kurangnya Koordinasi

Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak efektif. Kurangnya koordinasi dalam penyaluran bantuan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dalam penyaluran bantuan.
2) Kurangnya perencanaan yang matang dalam penyaluran bantuan dapat menyebabkan

kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait.

3) Perbedaan tujuan dan prioritas antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dalam penyaluran bantuan.
4) Kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dalam penyaluran bantuan.

4. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, termasuk dalam hal ini dari aspek anggaran maupun tenaga kerja, dapat membatasi pelaksanaan program.

5. Masalah Teknis

Masalah teknis, seperti kesalahan dalam sistem pembayaran atau distribusi bantuan, dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Berdasarkan indikator efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas kebijakan program bantuan sosial yang ada di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan penuturan masyarakat pada hasil wawancara. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari; dan 2) Kendala yang dihadapi dalam penyaluran program bantuan sosial yang ada di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yaitu keterbatasan data yang dimiliki, dan keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Kendala lain yang dihadapi berdasarkan observasi adalah kurangnya koordinasi antar pemerintah, keterbatasan sumber daya, dan masalah teknis lainnya di lapangan.

REFERENSI

Andi Asnidar, Jamaluddin Sawaji, Abdul Samad A (2025). Pengaruh Bantuan Sosial, Pendapatan Keluarga dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Lawe-Lawe. YUME : Journal of Management, 8 (1), 1119 – 1132.

Azis Juniant Maulana, Titin Rohayatin, Dadan Kurnia (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Jurnal Praxis Idealis, 2 (1), 16 – 24.

Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. (2024). Evaluasi Program Bantuan Sosial di Kabupaten Kapuas. Kapuas: Dinas Sosial Kabupaten Kapuas.

Devi Sasmita (2024). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Intan Puspitasari, Diana Puspita Retno, Salsabilla Auliazaki A, Tiara Nebrisca Valonika A (2025). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal, 4 (1), 156-163.

Kementerian Sosial RI. (2024). Laporan Kinerja Bantuan Sosial di Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Kemensos RI.

MHD Rafi Yahya, Ilham Yuri Nanda (2025). Evaluasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi kasus; Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar). SUMUR -Jurnal Sosial Humaniora, 3 (1), 27-34.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Manajemen, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nofriansyah, D. (2018). Penelitian Kualitatif: Analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Deepublish.

Sugiyono. 2019. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Susanto, H. (2021). Efektivitas dan Tantangan Program Bantuan Sosial di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rahman, T. (2020). "Analisis Efektivitas Program Bantuan Sosial di Wilayah Pedesaan." Jurnal Sosial Ekonomi Indonesia, 15(1), 30-50.

Saputra, D. (2019). Implementasi Kebijakan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Program Bantuan Langsung Tunai. Jakarta: PT Pustaka Nusantara.

Wahyudi, A. (2022). "Implementasi Program Bantuan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Beberapa Daerah." Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara, 10(2), 45-60.